

## Partisipasi Masyarakat Desa dan Pelaku Usaha dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Toba

### *Participation of Village Communities and Business Actors on Sustainable Tourism Development in Toba Regency*

Bayu Budiandrian<sup>1,\*</sup>, Tri Budiarto<sup>2</sup>, Versa Hikmatyar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Pertanian Bogor, Indonesia

<sup>\*)</sup>E-mail korespondensi: [bayubudiandrian@gmail.com](mailto:bayubudiandrian@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Sustainable tourism development certainly requires active participation from all parties. Sustainable tourism will not be achieved without the participation of local communities and business actors in these tourism destinations. The paradigm of sustainable tourism development has a logical consequence, which was making local communities and business actors as a subject of development, not just objects of development. This research provides an overview of how the level of participation of the community and business actors in the Toba Super Priority Destinations (DSP) where studied located in 4 villages including; Tomok Village, Lumban Bulbul Village, Lumban Gaol Village, and Siallagan Pindaraya Village. The amount of respondents in this study was 100 respondents which is consist of Village Government, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), Business Actors, and Village Community Organizations (Bumdes, Karang Taruna, PKK, etc.). The results of this study show that the level of community participation in the planning stage is 63% in the medium category and 37% in the high category. At the implementation stage, 66% is in the high category and 34% is in the medium category. While at the monitoring and evaluation stage the level of community participation is 70% in the medium category and 30% in the high category. This study also identified that as many as 79% of business actors in DSP Toba use their own business capital while the other 21% use capital from other parties. The categories of business actors in DSP Toba include 47% culinary business, 39% handicraft business, 7% service provision, and 7% are other businesses.*

**Kata kunci:** Community Participation, Super Priority Destinations, Sustainable Tourism, , Toba

#### ABSTRAK

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dipastikan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Pariwisata yang berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dari masyarakat lokal dan pelaku usaha di destinasi pariwisata tersebut. Paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki konsekuensi logis yaitu menjadikan masyarakat lokal dan pelaku usaha sebagai subyek pembangunan, bukan sekedar obyek pembangunan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di Destinasi Super Prioritas (DSP) Toba dengan lokus studi di 4 Desa antara lain; Desa Tomok, Desa Lumban Bulbul, Desa Lumban Gaol, dan Desa Siallagan Pindaraya. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden yang terdiri dari Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan Desa. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah 63% kategori sedang dan 37% kategori tinggi. Pada tahap pelaksanaan adalah 66% kategori tinggi dan 34% kategori sedang. Sementara pada tahap monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat 70% kategori sedang dan 30% kategori tinggi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat sebanyak 79% pelaku usaha di DSP Toba menggunakan modal usahanya sendiri sementara 21% lainnya modal dari pihak lain. Adapun kategori pelaku usaha di DSP Toba antara lain 47% usaha kuliner, 39% usaha kerajinan tangan, 7% penyediaan jasa, dan 7% lainnya adalah usaha lainnya.

**Kata kunci:** Destinasi Super Prioritas, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat, Toba



## PENDAHULUAN

Konsep “keberlanjutan” pada mulanya berawal dari tumbuh dan berkembangnya Gerakan Lingkungan/*environmentalisme* yang populer dan menjadi tren di tahun 1970 an. IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) secara eksplisit menerapkan ide tersebut dalam *World Conservation Strategy* yang terbit pada tahun 1980. Pada tahun 1987, laporan *Brundtland Commission* atau lebih dikenal dengan *World Commission on Environment and Development (WCED)* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan *resources* generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Lebih lanjut ditekankan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah keadaan harmonis yang bersifat stabil, melainkan proses perubahan yang dinamis dimana semua sektor berjalan dengan selaras dan dapat meningkatkan potensi atau keuntungan yang ada saat ini dan masa depan guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. (WCED, 1987; Liu, 2003).

Dalam sektor pariwisata, terdapat banyak definisi untuk keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Page & Dowling (2002) mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan dalam sektor pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan destinasi wisata saat ini seraya melindungi dan meningkatkan peluang untuk masa depan yang mengarah pada pengelolaan semua sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi dan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Lebih lanjut, Prosser (1994) menyebut ada empat kekuatan perubahan sosial yang mendorong kebutuhan pembangunan pariwisata berkelanjutan antara lain; 1.) Adanya ketidakpuasan dengan produk pariwisata yang saat ini ada; 2.) Perlunya menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kepekaan budaya; 3.) Realisasi berdasarkan daerah tujuan dari sumber daya berharga yang mereka miliki dan kerentanannya; dan 4.) Perubahan sikap pengembang dan pengelola wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak dari level lokal hingga nasional. Salah satu kunci utama keberhasilan dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha di destinasi wilayah tersebut. Paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki konsekuensi logis yaitu menjadikan masyarakat lokal dan pelaku usaha sebagai subyek pembangunan, bukan sekedar obyek pembangunan. Hal tersebut dibutuhkan karena tidak ada yang bisa dicapai tanpa adanya pemahaman yang baik serta skema pengelolaan sektor pariwisata yang tepat.

Pembangunan sektor Pariwisata di Destinasi Super Prioritas (DSP) Toba sendiri merupakan peluang sekaligus tantangan. Letak geografis wilayah Toba yang melintasi delapan (8) Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, dan Dairi, membuat koordinasi antar Pemerintah disetiap level menjadi syarat mutlak untuk kelancaran pengembangan wisata di DSP Toba. Di level pusat, Pemerintah melalui Presiden telah membentuk lembaga khusus yang menangani pembangunan, pengembangan dan pelestarian Danau Toba, yaitu Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Pembentukan badan/lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (selanjutnya disebut dengan Perpres BOPKPDT). Berdasarkan Pasal 21 Perpres BOPKPDT, dijelaskan bahwa dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Danau Toba, pelaksana harus melibatkan Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang wilayahnya berhubungan dengan Danau Toba dengan merujuk kepada ketentuan Rencana Induk sebagaimana yang diatur dalam Perpres BOPKPDT. Perpres tersebut sejatinya mensyaratkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembangunan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya semangat kolaboratif bagi semua *stakeholder* terkait dalam upaya pembangunan sektor pariwisata.

## PERUMUSAN MASALAH

Pembangunan sektor pariwisata di Indonesia selama ini masih bersifat konvensional dan *top-down*. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program-program pariwisata yang mayoritas di inisiasi oleh pusat ketimbang daerah. Hal tersebut adalah konsekuensi dari pembangunan yang berbasis pada anggaran dimana Pemerintah Pusat tentu saja lebih leluasa terhadap akses anggaran ketimbang Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. Seringkali pengembangan suatu lokasi pariwisata sangat bergantung pada intervensi anggaran dari pusat. Banyak lokasi atau spot-spot pariwisata yang sangat potensial tidak dapat berkembang hanya karena alasan belum mendapatkan intervensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Meski

demikian, pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedikit banyaknya merubah paradigma pembangunan, tak terkecuali pada sektor pariwisata. Dampak dari UU tersebut, saat ini Desa merupakan pemerintahan yang otonom. Pemerintah Desa juga berhak mengatur secara utuh proses pembangunan di Desa nya dengan adanya Dana Desa. Penggunaan Dana Desa oleh pemerintah Desa ditentukan melalui mekanisme musyawarah Desa. Dengan demikian, saat ini Desa memiliki kemampuannya sendiri untuk membangun apapun yang dirasa perlu oleh Masyarakat Desa, termasuk pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan dan sektor yang strategis karena memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembangunan perekonomian Nasional maupun Lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan berpotensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata yang mempunyai dampak besar terhadap peningkatan penerimaan devisa negara, pendapatan daerah juga memperluas ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber alam, mengembangkan kreativitas dan keterampilan masyarakat lokal serta sumber-sumber yang bernilai ekonomis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dapat dijadikan sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia bahkan telah menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam, budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di destinasi pariwisata. Pariwisata juga menjadi salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Toba merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2019. Pemerintah telah menetapkan 5 Destinasi Super Prioritas antara lain Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Joglosemar), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). Dengan melakukan penetapan 5 destinasi super prioritas tersebut, maka Pemerintah fokus pada pengembangan destinasi dimaksud, mulai dari pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, dan pengembangan sumber daya manusia (pengembangan keahlian atau skill, kompetensi dan masyarakat). Selain itu, penetapan DSP dilakukan untuk meningkatkan daya saing global agar kegiatan ekonomi dapat terdorong, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, memberikan perluasan kesempatan kerja, serta berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penelitian ini mencoba mengukur sejauhmana pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan di DSP Toba dengan mengajukan pertanyaan penelitian yaitu; (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di DSP Toba? (2) Bagaimana peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di DSP Toba?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di 4 lokasi Desa antara lain Desa Lumban Bulbul, Desa Lumban Gaol, Desa Tomok, dan Desa Siallagan Pindaraya. Penelitian dilaksanakan pada November – Desember tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mix method* yang menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan metode *survey*, sementara pengumpulan data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan teknik pengambilan data wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan serta dibantu dengan proses diskusi kelompok terfokus atau FGD dari tingkat Desa sampai Kabupaten.

Responden dalam penelitian ini sejumlah 100 responden yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pokdarwis, Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan Desa. Pengukuran tingkat partisipasi masyarakat ini dibantu dengan skoring, dan pemberian skor dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Skor yang digunakan terdiri dari 5 jenjang (5,4,3,2,1). Penentuan skoring pada tingkat partisipasi melalui tahap sebagai berikut; (a.) Menentukan banyaknya kelas. Kelas yang ditetapkan dalam Kajian Lapangan ini adalah 5 kelas, yaitu: Sangat Intens (5), Intens (4), Cukup Intens (3), Kurang Intens (2), dan Tidak Intens (1); (b) Menentukan kisaran. Kisaran adalah selisih antara nilai pengamatan tertinggi dengan nilai pengamatan terendah; (c) Menentukan kategori. Kategorisasi atau pengelompokan tingkat partisipasi dibagi menjadi Tinggi, Sedang, dan Rendah.

Data yang telah diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif selanjutnya diolah dan dianalisis. Data kuantitatif dari kuesioner diolah dengan menggunakan Ms. Excel 2016 dan SPSS v.12 untuk menyajikan informasi mengenai data tabel frekuensi dan tabulasi silang. Data kualitatif dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan menuliskan hasil wawancara mendalam tersebut dalam bentuk tulisan dan mengolahnya dengan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah data direduksi, kemudian data disajikan dengan menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan berupa kutipan atau tipologi. Data yang telah disajikan lalu diverifikasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di 4 lokasi Desa antara lain Desa Lumban Bulbul, Desa Lumban Gaol, Desa Tomok, dan Desa Siallagan Pindaraya. Adapun karakteristik dari masing-masing desa adalah sebagai berikut:

### **a. Desa Lumban Bulbul**

Desa Lumban Bulbul adalah Desa yang di dominasi oleh Atraksi Wisata Danau Toba. Desa Lumban Bul-Bul adalah sebuah desa yang berada di pinggir Danau Toba dan memiliki luas 71 Ha<sup>2</sup>, dengan batasan wilayah sebagai Berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sibola Hotang SAS.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lumban Dolok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lumban Silintong.
- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Danau Toba.

Letak Kantor Desa berada di Jalan Kabupaten dari Kantor Kecamatan mengarah ke arah timur, sedangkan Jarak Desa ke Kecamatan adalah 2 Km. Berdasarkan status perkembangan desanya, Desa Lumban Bulbul adalah desa dengan status Berkembang. Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa PDTT (2020), sumber pendapatan utama desa Bulbul bersumber dari Dana Desa, dimana pada tahun 2020 Desa Lumban Bulbul mendapatkan sebesar Rp. 753,389,000. Sejak mendapatkan Dana Desa pertama kali pada tahun 2016, Dana Desa di Lumban Bulbul cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016, Dana Desa Lumban Bulbul sebesar Rp. Rp. 588,079,000, kemudian meningkat menjadi Rp. 747,372,000 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 667,576,000, dan meningkat Kembali di tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 764,459,972. Berdasarkan penggunaannya, Dana Desa di Lumban Bulbul belum pernah dialokasikan secara spesifik untuk pengembangan sektor pariwisata di Desa. Namun demikian, menurut Kepala Desa terpilih yang Baru, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2023, ada alokasi Dana desa untuk sektor pariwisata di desa yang tentu saja diproses melalui Forum Musyawarah Desa dengan persetujuan dari masyarakat desa.

### **b. Desa Lumban Gaol**

Lumban Gaol adalah salah satu desa di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Desa Lumban Gaol memiliki jumlah penduduk sebanyak 1203 Jiwa dengan rata-rata jumlah Rumah Tangga sebanyak 281 KK dengan komposisi 600 Laki-Laki dan 603 Perempuan. Desa Lumban Gaol memiliki luas wilayah sebesar 1,58 Km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk 761,39 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Berdasarkan status perkembangan desanya, Desa Lumban Gaol masuk dalam kategori Desa Maju berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2020 (IDM). Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa PDTT (2020), dapat diketahui bahwa peruntukan anggaran Dana Desa yang terbesar adalah untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta saluran irigasi, dimana belum ada alokasi khusus Dana Desa yang diperuntukan bagi pengembangan sektor pariwisata Desa.

### **c. Desa Tomok**

Salah satu daerah di Kabupaten Samosir yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata sejarah adalah Desa Tomok. Tomok merupakan daerah tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan diantara desa-desa yang ada di Pulau Samosir. Desa Tomok memiliki luas wilayah 6,2 km<sup>2</sup> dengan persentase terhadap luas Kecamatan sebesar 5,32 persen. Jumlah penduduk di Desa Tomok mencapai 2115 jiwa dengan kepadatan penduduk 341,13 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Tomok merupakan daerah asal Marga Sidabutar. Karenanya hampir seluruh lapisan masyarakat setempat yang ditemui disana merupakan bagian dari klan Marga Sidabutar. Berdasarkan status perkembangannya Desa Tomok adalah desa dengan kategori Berkembang menurut Indeks Desa Membangun tahun 2020 (IDM). Dana Desa Tomok di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 743,041,000. Pendapatan tersebut lebih tinggi sejak Desa Tomok memperoleh Dana Desa di tahun 2016 sebesar Rp. 613,881,000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 778,723,000, pada tahun 2018 sebesar Rp. 662,503,000, pada tahun 2019 sebesar Rp.

746,629,000.

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa PDTT (2020), dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa yang terbesar adalah untuk penanganan keadaan mendesak. Hal ini terkait dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan munculnya regulasi penyaluran BLT-DD untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Selain itu, dapat diketahui pula, bahwa belum ada alokasi Dana Desa yang spesifik ditujukan untuk pengembangan sektor pariwisata Desa.

d. Desa Siallagan Pindaraya

Berdasarkan sejarahnya, awal mula Desa Siallagan Pindaraya di huni oleh Marga Siallagan. Kemudian para keturunan marga Siallagan tersebut, anak laki-laki mendiami Huta Siallagan, Huta Parhapuran dan Huta Janji Maria dan anak perempuan mendiami Huta Pinda dan Lumban Hariara (Marga Marpaung, Silalahi, dan Sinaga). Pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1904 Kampung Siallagan merupakan satu kenegerian yang dinamai kenegerian Ambarita dimana pada tahun 1945 Indonesia merdeka, nama kenegerian berakhir dan selanjutnya diadakan pemilihan kepala kampung oleh pemerintah Indonesia. Nama kenegerian berubah menjadi Wedana. Selang beberapa tahun, Wedana berubah nama menjadi Camat dan pada tahun 1992 Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penggabungan dan pemekaran desa yang akhirnya Kampung Unjur, Kampung Labuan, Kampung Ambarita Pasar, dan Kampung Siallagan digabung menjadi 1 (satu) Desa dan dinamai Desa Ambarita. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Simanindo, Nainggolan, Palipi, Sitio-tio dan Kecamatan Harian, Desa Siallagan Pindaraya resmi menjadi salah satu Desa di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Pada tahun 2020, Desa Siallagan Pindaraya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 820,334,000. Lebih tinggi dari tahun 2016 dimana Desa Siallagan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 598,078,000. Pada tahun 2017 Desa Siallagan Pindaraya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 759,631,000, kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar Rp. 692,661,000, dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar Rp. 809,691,000.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks Pembangunan Desa, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting penunjang ekonomi masyarakat lokal (secara mikro), yang bahkan telah terbukti berhasil memberikan devisa bagi Negara (secara makro), sehingga untuk menjalankan kegiatan pariwisata sebaiknya dilakukan secara *pentahelix* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang Pariwisata. Pada level Desa sendiri, terdapat banyak institusi atau kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, Bumdes, PKK, Kelompok Tani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Kelompok Tani Wanita, Kelompok keagamaan, Kelompok Kesenian, termasuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Sehingga, keberhasilan dalam menjalankan serta mengembangkan dan membangun pariwisata perlu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat di daerah wisata.

DSP Toba memiliki spot wisata unggulan berupa atraksi sumberdaya alam itu yakni panorama alam Danau Toba. Danau Toba adalah daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati pesona alam yang mengelilinginya. Selain menghadirkan danau, wisata alam lain antara lain air terjun, dan pemandangan matahari tenggelam (sunset). Keindahan lainnya adalah pantai pasir yang ada di Danau Toba yang memberikan atraksi tambahan. Atraksi sumberdaya alam yang lainnya antara lain: Batu bernafas, Aek Natonang, Batu Marhusa, Embung Air Siulak, dan Batu Hobon. Selain atraksi sumberdaya alamnya yang menarik, atraksi wisata DSP Toba juga menyediakan atraksi sumberdaya buatan seperti: waterboom (permainan air), paralayang, Museum, penginapan/homestay, taman legenda, dan becak wisata. Komodifikasi budaya juga menjadi atraksi budaya yang tidak kalah menjadi faktor penarik wisatawan seperti Sigale-gale, sanggar tari (tari tor-tor), Tenun Ulos, Martumba, Makam Raja, Gondang Naposo, Batu Kursi Parhapuran, Lomba Solu dan Turnamen Marsingati cup.

Komunitas lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan komunitas dalam pembangunan objek wisata dapat menentukan tercapainya tujuan dari pariwisata berkelanjutan. Cole (2006) berpendapat bahwa partisipasi komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata terhubung dengan akses pengetahuan serta kemampuan untuk mengontrol dan mengatur sumber daya pariwisata, dengan demikian pengetahuan tentang kepariwisataan yang mumpuni dapat mendorong dan membentuk ikatan (*sense*) kuat pada komunitas lokal terhadap program pengembangan pariwisata. Sebagai kelembagaan lokal, Pokdarwis mempunyai tanggung jawab terhadap proses pembangunan pariwisata di daerahnya. Kehadiran Kelompok Sadar Wisata sebagai institusi lokal dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan atau manajerial, karena pada dasarnya Pokdarwis memiliki kewenangan untuk

mengatur setiap aktivitas pembangunan dan pengembangan pariwisata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Kelompok sadar wisata merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk kesadaran masyarakat terkait pembangunan pariwisata di daerahnya. Partisipasi masyarakat, merupakan pemberdayaan masyarakat melalui kontribusi peran dan kegiatan mulai penyusunan perencanaan sampai implementasi program pembangunan, serta bukti kesukarelaan dan komitmen masyarakat untuk berkorban serta terlibat dalam penerapannya (Adisasmita 2006). Dari variabel inilah partisipasi masyarakat dapat terukur dan terlihat pada implementasi pembangunan dan pengembangan suatu desa wisata.

Partisipasi pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam penelitian ini diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam satu tahapan siklus program yang terdiri dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan/Implementasi dan Tahap Monitoring Evaluasi. Tahap Perencanaan dalam survei ini diukur dari beberapa sub-indikator antara lain; Keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan dan sosialisasi kegiatan program pembangunan pariwisata, Penjelasan yang cukup dari Pemerintah Daerah kepada partisipan tentang perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan, Keterlibatan peserta dalam memberi usulan tentang jenis pengembangan program pembangunan pariwisata, Keterlibatan partisipan memberi usulan tentang prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan, Keterlibatan partisipan dalam memberikan usulan bagaimana kegiatan pembangunan akan dilakukan, respon/ tanggapan dari pihak penyelenggara program kepada peserta kegiatan, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan/waktu yang cukup memadai kepada partisipan untuk memberikan usulan perencanaan program pembangunan pariwisata, Partisipan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan dan perancangan, Partisipan hadir dalam pertemuan untuk penyampaian usulan perencanaan dan perancangan program pembangunan pariwisata yang akan dilakukan, Pengaruh ketua RT/RW, Lurah untuk menentukan rencana dan rancangan program pembangunan pariwisata, Pengaruh tokoh masyarakat untuk menentukan rencana dan rancangan program pembangunan pariwisata, Pengaruh pihak kelurahan/kecamatan untuk menentukan rencana dan rancangan program pembangunan pariwisata, Partisipan merasa bermanfaat ikut dalam rapat perencanaan pembangunan pariwisata.

Tahap pelaksanaan atau implementasi program diukur dari beberapa indikator antara lain; Keterlibatan masyarakat dalam memberi sumbangan/ input untuk pengembangan program pembangunan pariwisata, Partisipasi responden dalam menyiapkan kegiatan perencanaan pengembangan program pembangunan pariwisata, Partisipan memberikan saran dalam menyediakan tempat untuk mengadakan kegiatan perencanaan pengembangan program pembangunan pariwisata, Partisipan mendaftarkan diri sendiri dalam kegiatan program pembangunan pariwisata, Partisipan mengetahui lokasi penentuan pembentukan program pembangunan pariwisata, Partisipan mengetahui program pembangunan pariwisata, Partisipan turut menyumbang sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya, Responden mendapatkan pengetahuan terkait pelaksanaan program pembangunan pariwisata, Responden melihat adanya perubahan yang cukup besar pada kehidupan saya setelah adanya program pembangunan pariwisata, Responden merasa program pembangunan pariwisata memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, Responden memanfaatkan program pembangunan pariwisata sebagai salah satu strategi pencaharian nafkah.

Tahap Monitoring dan Evaluasi pada survei ini diukur melalui beberapa indikator antara lain; Responden ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan pariwisata, Responden mengetahui kepada siapa usulan perbaikan disampaikan, responden merasa bermanfaat ikut dalam kegiatan penilaian evaluasi perencanaan, Pengaruh ketua RT/RW untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi, Pengaruh tokoh masyarakat untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam evaluasi, responden mendapatkan feedback atas usulan yang disampaikan, terdapat pengaruh pihak kelurahan/ kecamatan untuk melakukan perubahan/ perbaikan dalam evaluasi, responden mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan, Disporabudpar memberi kesempatan yang cukup kepada responden untuk melakukan penilaian/ evaluasi atas perencanaan dan perancangan pengembangan program, dan responden puas dengan kegiatan penilaian evaluasi perencanaan.

Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan bisa dilihat pada **gambar 4. (Lampiran)**. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa distribusi tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program pembangunan pariwisata berkelanjutan di DSP Toba didominasi oleh kategori Sedang dengan jumlah persentase sebanyak 62% responden. Sementara 37% responden masuk dalam kategori tinggi, dan terdapat 1% responden dengan tingkat partisipasi rendah. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha di DSP Toba

berpartisipasi secara cukup baik pada tahap perencanaan. Berdasarkan informasi tersebut, maka partisipasi masyarakat dan pelaku usaha masih dapat dioptimalkan. Adapun upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan melaksanakan rapat rutin di Desa, melakukan studi banding ke desa-desa wisata lainnya dan belajar dari lapang mengenai pengalaman membentuk kelembagaan pokdarwis di desa lain, pemberian award atau apresiasi bagi anggota yang berprestasi, dan instrument lain yang mampu mengeratkan dan meningkatkan kekompakan antar anggota masyarakat. Selain itu, pendampingan secara programatik juga perlu dilakukan guna memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dilapangan menjadi signifikan.

Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan bisa dilihat pada **gambar 5. (Lampiran)**. Berdasarkan gambar tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pada tahap pelaksanaan program pembangunan pariwisata berkelanjutan di DSP Toba pada kategori tinggi yaitu 66% dan 34% responden kategori partisipasi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di DSP Toba sudah cukup baik pada tahap pelaksanaan program pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan observasi dan wawancara ditemui bahwa memang keanggotaan pokdarwis dirasakan belum optimal sehingga membutuhkan instrumen agar partisipasi anggota pokdarwis meningkat. Terlebih lagi bahwa pokdarwis merupakan suatu Lembaga yang bersifat nirlaba yang dalam hal ini pokdarwis tidak diperkenankan menjadi Lembaga yang mencari keuntungan. Operasionalisasi pokdarwis sebgai besar merupakan sumbangan sukarela dari anggota sehingga hal ini menjadi salah satu factor mengapa partisipasi masyarakat sebagai anggota pokdarwis belum cukup tinggi. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan Bersama mengenai bagaimana operasional biaya kegiatan pokdarwis sehingga tidak memberatkan masyarakat yang menjadi anggota pokdarwis.

Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan bisa dilihat pada **gambar 6. (Lampiran)**. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi pokdarwis dalam tahap monitoring dan evaluasi program yaitu 70% pada kategori sedang dan 30% pada kategori sedang. Hal tersebut membuktikan bahwa, kebanyakan masyarakat dan pelaku usaha masih belum dioptimalkan dalam tahap monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, perbaikan program tetap sangat perlu dilakukan, agar tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi pada saat pelaksanaan program saja, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha harus dilibatkan dalam tahap perencanaan dan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi pokdarwis dimana kelembagaan tersebut dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat maupun anggota pokdarwis di DSP Toba untuk saling berbagi ilmu dan *share* kegiatan. Silaturahmi antar pokdarwis dapat turut andil dalam meningkatkan partisipasi pokdarwis pada pelaksanaan program pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan karakteristiknya, pelaku usaha di DSP toba dapat dikelompokan berdasarkan jenis produknya antara lain; kuliner, jasa, kerajinan tangan, dan lainnya (seperti penginapan, dll). Berdasarkan **gambar 1. (Lampiran)** maka dapat diketahui bahwa terdapat 47% responden yang memiliki usaha kuliner, 39% responden memiliki usaha kerajinan tangan, 7% jasa, dan 7% usaha lainnya. Adapun Sumber Modal bagi pelaku usaha di DSP Toba dapat dilihat pada **gambar 2. (Lampiran)** yaitu 79% responden berasal dari modal sendiri, sementara 21% berasal dari modal pihak lain. Status bangunan atau tempat usaha pelaku usaha di DSP Toba **gambar 3. (Lampiran)** yaitu 43% berstatus milik sendiri, 32% sewa, 18% bagi hasil, 7% lainnya.

Berdasarkan kondisi karakteristik di atas, diperlukan pendampingan khusus atau bantuan khusus agar para pelaku usaha tetap *survive* dan dapat mengembangkan usahanya di lokasi pariwisata. Adapun jumlah pelaku usaha berdasarkan potensi usaha ini sangat prospek dalam mendukung keberhasilan berkembangnya DSP Toba. Beberapa pelatihan dan pendampingan dalam menopang keberhasilan usaha pariwisata di DSP Toba adalah:

1. Pelatihan memetakan berbagai potensi pariwisata DSP Toba
2. Pelatihan meningkatkan kapasitas pelaku usaha pendukung pariwisata seperti perdagangan, *handycraft*, jasa pariwisata seperti pemandu wisata, dan jasa lainnya
3. Pelatihan perencanaan usaha dengan modal yang sangat terbatas dengan melakukan kerjasama usaha sesuai klaster usaha melalui kerjasama antar BUMDes dan antar Desa melalui kapitalisasi
4. Pelatihan berkaitan dengan usaha outdoor dan indoor jasa pariwisata dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi terutama dalam aksesibilitas pasar yang semakin terbuka
5. Pelatihan Kewirausahaan berbasis potensi sumberdaya pariwisata
6. Pendampingan dalam mengembangkan usaha jasa pariwisata

Dengan demikian, maka para pelaku usaha dapat secara signifikan menjadi bagian dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan karena menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat lokal setempat. Hal tersebut juga menandakan bahwa pelaku usaha di DSP Toba masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan, khususnya pada penyediaan pasar. Hal ini ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada penawaran produk wisata dimana jumlah wisatawan menurun drastis. Tentu saja, optimisme dan peningkatan daya saing produk menjadi sangat penting dalam mendorong peningkatan kinerja usaha di DSP Toba.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia sedang dalam proses “*in the making*”. Pada level nasional, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pentingnya kolaborasi dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya regulasi yang mengatur pembangunan pariwisata di DSP Toba yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Di level Desa, pemerintah desa saat ini juga memiliki ruang untuk secara otonom membangun objek-objek pariwisata di Desa dengan adanya Dana Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata, selama mekanisme penggunaan Dana Desanya ditempuh melalui forum musyawarah Desa. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha di Destinasi Super Prioritas (DSP) Toba dengan lokus studi di 4 Desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah 63% kategori sedang dan 36% kategori tinggi dan 1% kategori rendah. Pada tahap pelaksanaan adalah 66% kategori tinggi dan 34% kategori sedang. Sementara pada tahap monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat 70% kategori sedang dan 30% kategori tinggi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat sebanyak 79% pelaku usaha di DSP Toba menggunakan modal usahanya sendiri sementara 21% lainnya modal dari pihak lain. Adapun kategori pelaku usaha di DSP Toba antara lain 47% usaha kuliner, 39% usaha kerajinan tangan, 7% penyediaan jasa, dan 7% adalah usaha lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book**

Page, S. J., & Dowling, R. K. (2002). *Ecotourism*. Harlow: Prentice Hall.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.

### **Book Chapter**

Prosser, R. (1994). Societal change and the growth in alternative tourism. In E. Cater & G. Lowman (Eds), *Ecotourism: A Sustainable Option?* (pp. 19–37). John Wiley.

### **Journal**

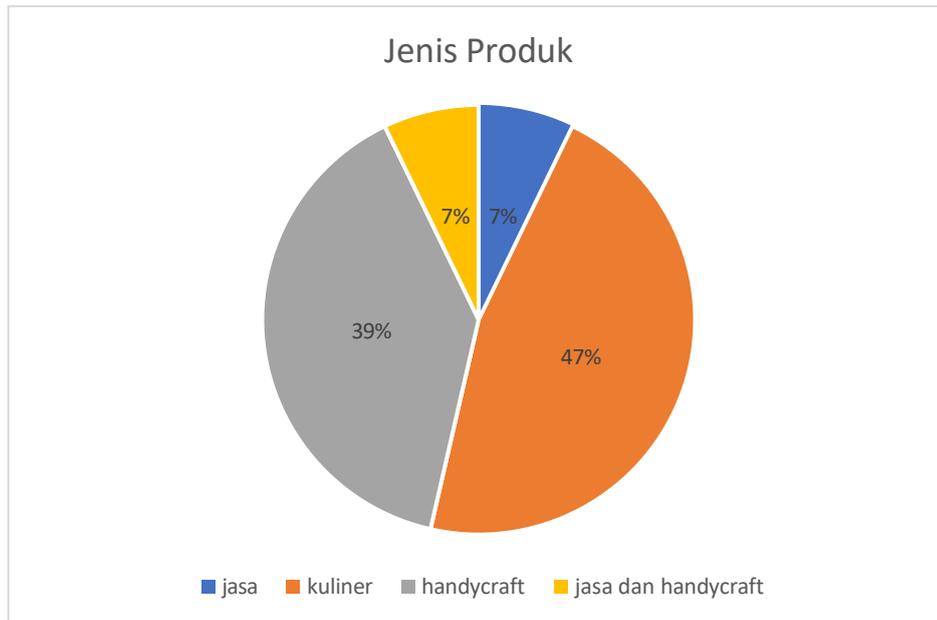
Liu, Z. (2003). Sustainable Tourism Development: A Critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11:6, 459-475, <https://doi.org/10.1080/09669580308667216>

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21:6, 613–33, [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)

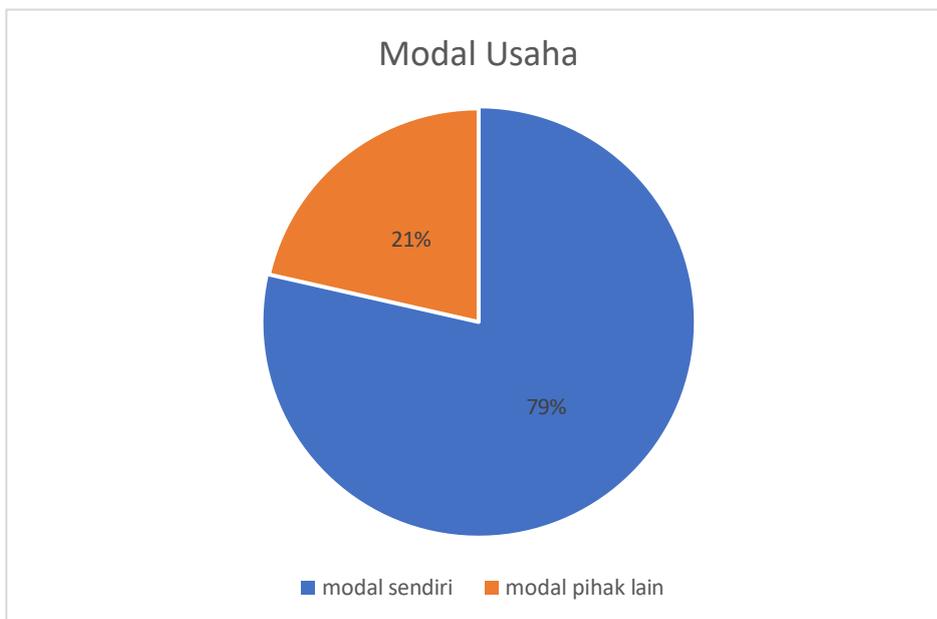
Ira, W.S., & Muhamad. (2019). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *Jurnal Terapan Pariwisata*, 3:2, 124-135, <https://doi.org/10.22146/jpt.43802>

## DAFTAR GAMBAR

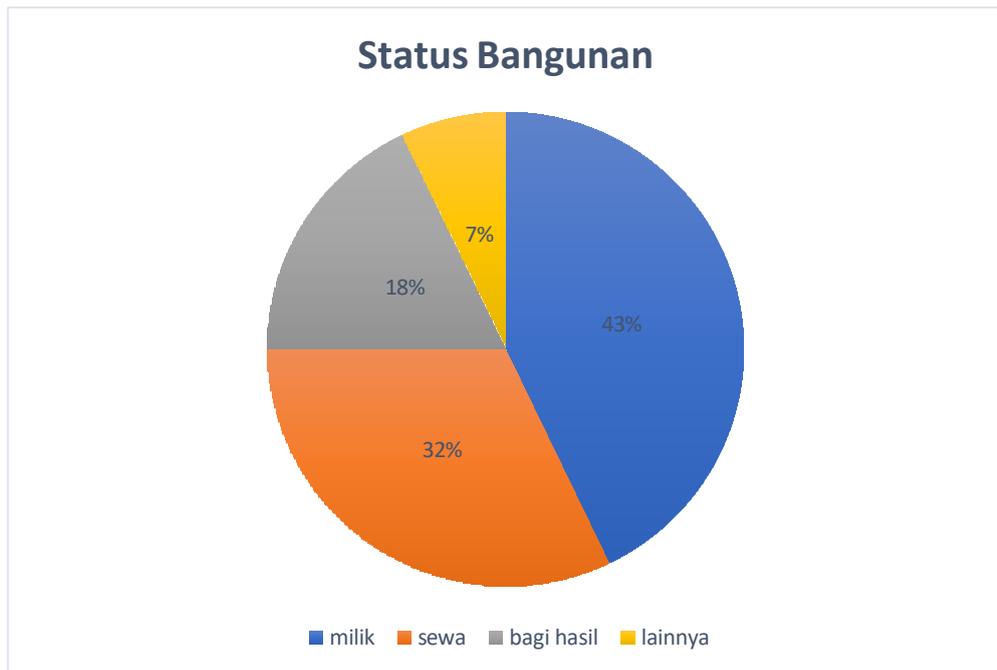
### 1. Karakteristik Pelaku Usaha di DSP Toba



**Gambar 1.** Jenis Produk Para Pelaku Usaha di DSP Toba

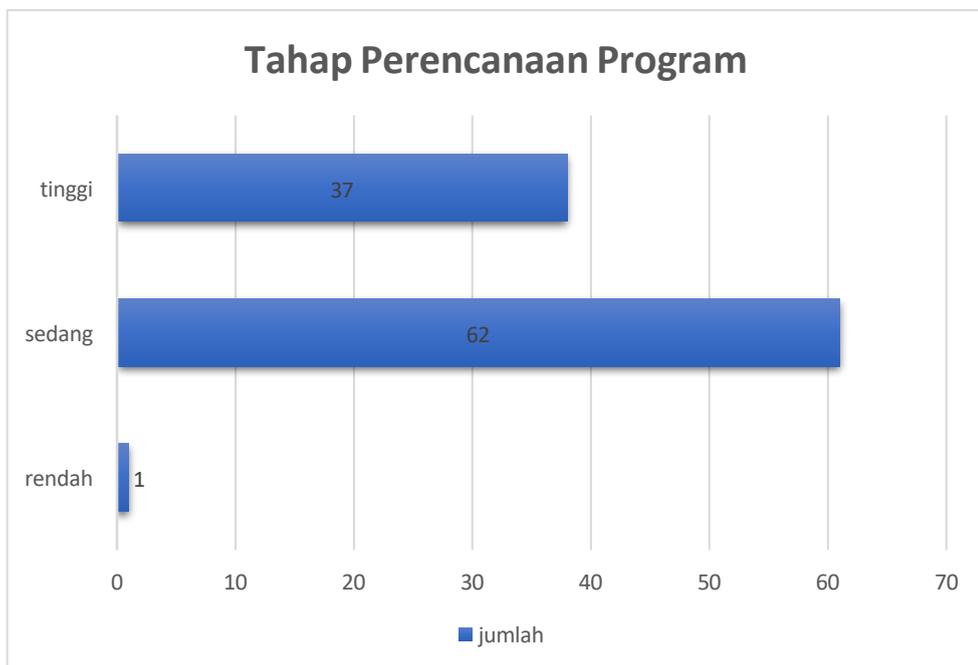


**Gambar 2.** Modal Usaha Para Pelaku Usaha di DSP Toba

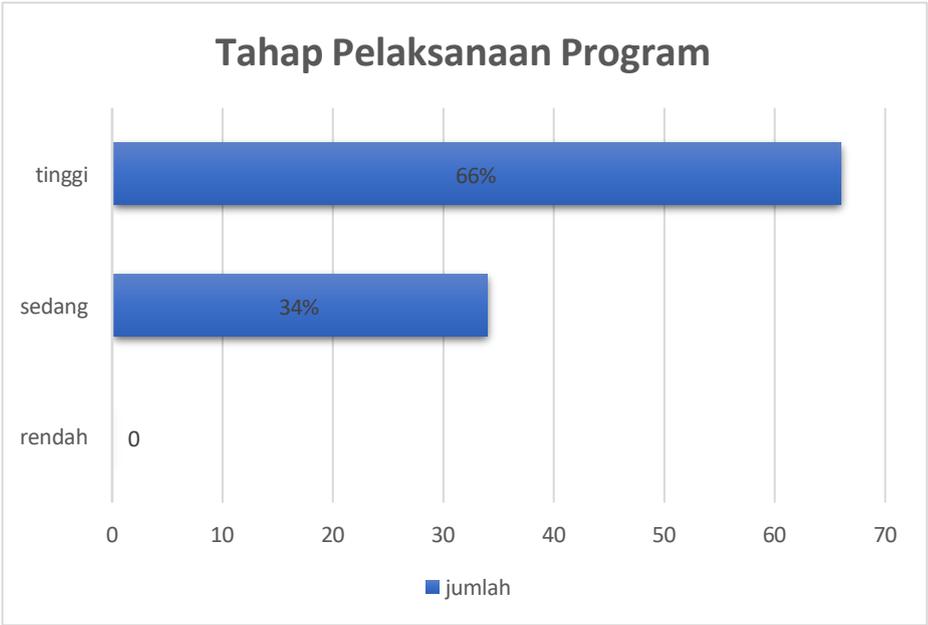


**Gambar 3.** Status Bangunan Para Pelaku Usaha di DSP Toba

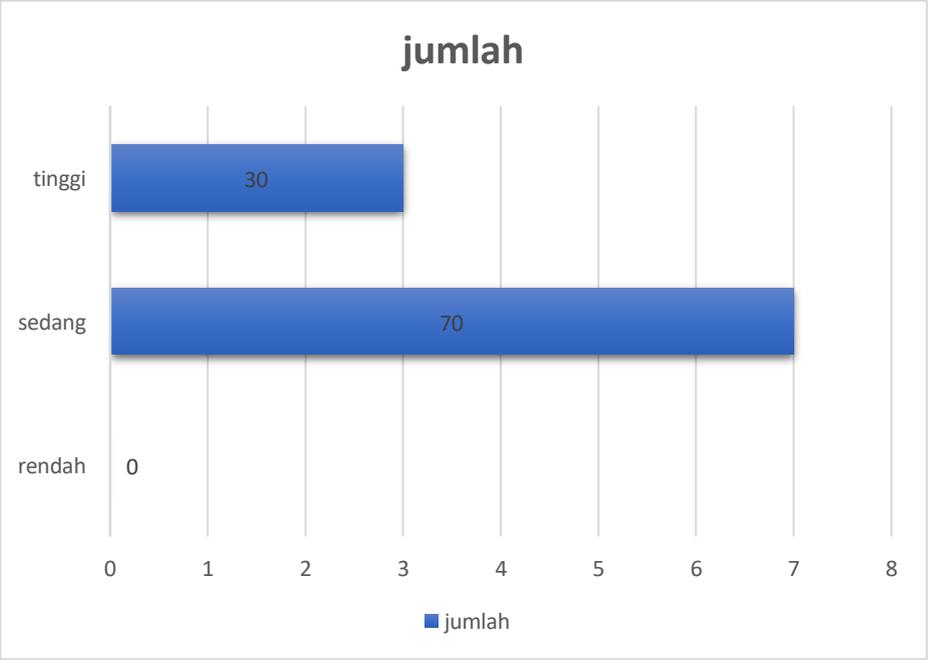
## 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat



**Gambar 4.** Tingkat Partisipasi Masyarakat Tahap Perencanaan di DSP Toba



**Gambar 5.** Tingkat Partisipasi Masyarakat Tahap Pelaksanaan Program di DSP Toba



**Gambar 6.** Tingkat Partisipasi Masyarakat Tahap Monev di DSP Toba

### 3. Dokumentasi



**Gambar 7.** Atraksi Wisata di Desa Lumban Bulbul



**Gambar 8.** Usaha Penyewaan Kapal dan ATV di lokasi wisata